

## Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 26/06/2024*

**TANA PASER** – Bupati Paser Fahmi Fadli menghadiri Rapat Paripurna tentang Kesepakatan antara Bupati Paser dengan DPRD Paser terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser 2023.

Bupati Fahmi menyampaikan secara singkat beberapa data. Di antaranya realisasi Pendapatan Daerah 2023 sebesar Rp3,73 triliun atau sekitar 104,64 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2023 Rp3,56 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp3,13 triliun, terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar Rp599,62 miliar atau 19,15 persen.

“Realisasi total pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah sebesar Rp301,34 miliar,” kata Fahmi, Selasa (25/6).

Sementara untuk pendapatan transfer total sebesar Rp3,42 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp6,78 miliar.

Fahmi menyampaikan pada komponen belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga total realisasinya Rp4 triliun atau 88,77 persen dari total rencana belanja yang direncanakan sebesar Rp4,51 triliun.

Pada sisi pembiayaan, untuk komponen penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu realisasinya Rp966,60 miliar. Selanjutnya pada sisi pengeluaran pembiayaan direalisasikan dana untuk penyertaan modal pemerintah daerah Rp15 miliar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp951,60 miliar.

Fahmi menyadari bahwa di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, banyak dinamika yang terjadi di masyarakat dan itu merupakan suatu yang normal dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Paser pada 2023 yang lalu.

Pemerintah Kabupaten Paser membutuhkan dukungan dan masukan yang kritis dari masyarakat, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan atau pun tahun yang akan datang.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser Maskur menyampaikan sejumlah apresiasi dan selamat kepada bupati dan jajarannya setelah Kabupaten Paser kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-11 kalinya secara berturut-turut, dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim untuk APBD 2023. Ini menandakan pengelolaan keuangan daerah transparan dan akuntabel. **(adv/jib/far)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel, 26/06/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dalam Pasal 150 UU 1/2022 diatur bahwa pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.